

# ANALISIS PERMASALAHAN WARGA NEGARA TERHADAP KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP-ELEKTRONIK) DI DESA KRADENAN KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI

Dahlia Dewi Sulistyawati<sup>1</sup> Andika Ronggo K.<sup>2</sup>  
Universitas PGRI Banyuwangi  
Program Studi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan  
email : [dewidahlia7@gmail.com](mailto:dewidahlia7@gmail.com) [andikaronggo@gmail.com](mailto:andikaronggo@gmail.com)

## ABSTRAK

*Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan data informasi kependudukan Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2006, pasal 13 UU tentang Administrasi Kependudukan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan administrasi yang tertib sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan untuk mencegah serta menutupi peluang adanya KTP ganda yang selama ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat yang dapat menyebabkan kerugian bagi negara. Tetapi program KTP-Elektronik ini belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan belum sepenuhnya terealisasi. Dari paparan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui beberapa permasalahan yang terjadi mengenai program KTP-Elektronik. (1) bagaimana permasalahan warga negara terhadap kepemilikan KTP-Elektronik di Desa Kradenan ? (2) bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Desa dalam menangani permasalahan pembuatan KTP-Elektronik ?*

*Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis materi penelitian berupa deskriptif analitik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa program KTP-Elektronik memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan diterapkannya program ini masyarakat menjadi lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan publik, karena saat ini untuk pelayanan asuransi, perbankan ataupun pelayanan publik lainnya sudah berbasis KTP-Elektronik. Kesimpulan yang didapatkan adalah program KTP-Elektronik yang diterapkan masih belum efektif, program ini masih belum efisien dikarenakan waktu pemrosesan yang cukup lama dikarenakan proses perekaman sarana dan prasarannya belum cukup memadai, dan masih belum tercapainya kebutuhan warga secara merata karena sering terjadinya ketidaktersediaan blanko yang membuat proses perekaman terhambat*

Kata kunci : *Permasalahan warga negara, Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-Elektronik)*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang besar dan memiliki penduduk dalam jumlah yang banyak. Penduduk Indonesia terlahir dari latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari ras, budaya, agama, status sosial, pendidikan yang menyebabkan memiliki pola pikir dan sudut pandang yang berbeda-beda. Indonesia memiliki tujuan yang telah tertuang dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Indonesia merupakan negara berkembang dengan penguasaan teknologi yang masih rendah, sehingga perlu meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi terhadap segala bidang terutama berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Melakukan pengaturan terhadap jumlah penduduk yang besar tidaklah mudah, diperlukan

suatu pengaturan yang komprehensif agar data mengenai penduduk bersifat valid dan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka dibuat suatu sistem yang mengatur mengenai kependudukan yang dikenal dengan Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28 D ayat (4) menentukan bahwa: "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan". Hal ini menunjukkan bahwa warga negara Indonesia wajib untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan identitas yang resmi dari Negara yakni KTP-Elektronik. Pemerintah atas dasar tersebut patut memberikan layanan (dari segi perilaku, sikap, tutur kata, proses lamanya pembuatan) dengan baik dan adil. Tetapi, harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, masih banyak masyarakat yang tidak menerima pelayanan dengan baik bahkan secara kasat mata diskriminasi itu masih sering terjadi.

Menurut Peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 poin 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Program KTP-Elektronik membawa harapan baru dalam menangani permasalahan yang lama, KTP-Elektronik di buat agar masyarakat dapat lebih mudah dalam membuat data diri dengan menggunakan sistem teknologi digital.

Berikut beberapa penelitian terdahulu : Penelitian yang dilakukan oleh Ferliana Harman dengan judul "Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Pelayanan pembuatan E-KTP di Kota Makassar" yang dilakukan pada Tahun 2016 dengan hasil : Kualitas kebijakan menyangkut banyak hal seperti :

kejelasan tujuan, kejelasan implementor / penanggung jawab implementasi dan lainnya. Lebih dari itu, kualitas suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh proses perumusan itu sendiri. Suatu kebijakan yang dirumuskan secara demokratis akan sangat memberikan peluang dihasilkannya kebijakan yang berkualitas. Besarnya anggaran dapat dipakai sebagai *proxy* untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Kurangnya responsif dari pelayanan mulai dari tingkatan petugas sampai pada tingkatan pertanggung jawaban instansi.

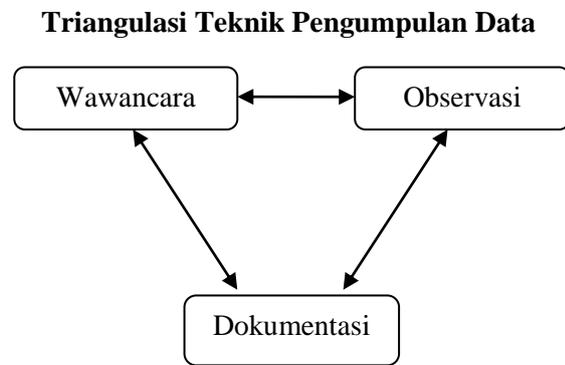
Adapun rumusan masalahnya ialah : Bagaimana permasalahan warga negara terhadap kepemilikan KTP-Elektronik di Desa Kradenan? Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menangani permasalahan pembuatan KTP-Elektronik ?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui permasalahan masyarakat terhadap kepemilikan KTP-Elektronik di Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Desa dalam menangani permasalahan kepemilikan KTP-Elektronik.

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis materi penelitian berupa deskriptif analitik. Pendekatan Kualitatif merupakan pendekatan penelitian melalui prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dimanfaatkan peneliti untuk mencari data tentang Analisis Permasalahan warga negara terhadap Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-Elektronik) di Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Triangulasi teknik, yaitu digunakan untuk menguji kredibilitas

data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.



(Gambar 1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data)

Penggunaan triangulasi di atas, diharapkan dapat menjamin tingkat kepercayaan data, serta untuk mencegah bahaya-bahaya subyektif. Dengan dilakukannya wawancara kepada informan tersebut di atas, maka dapat untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan kata lain bahwa pihak peneliti dapat melakukan “*check and recheck*” temuan temuannya dengan cara membandingkan hasil dari wawancara sebagai data primer dan hasil data sekunder berupa hasil observasi serta dokumentasi penelitian.

## HASIL PENELITIAN

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yang berjumlah 16 orang. Permasalahan yang terjadi selama ini adalah warga Desa Kradenan enggan melakukan perekaman KTP-Elektronik.

Dari hasil wawancara terhadap 16 responden diketahui faktor yang menjadi penghambat masyarakat Desa Kradenan tidak melakukan perekaman KTP-Elektronik disebabkan oleh beberapa permasalahan saat perekaman KTP-Elektronik yang ada di Desa Kradenan.

Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi pada warga saja tetapi pada pegawai Desa dan pegawai Kecamatan yang mengurus pembuatan KTP-Elektronik. Dari permasalahan-permasalahan tersebut peneliti dapat menjabarkan permasalahan dalam permasalahan tersebut. Permasalahan yang terjadi pada keadaan para warga yang datang untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan permasalahan yang datang pada pemerintah Kecamatan atau Desa tempat mengurus KTP-Elektronik, peneliti akhirnya menemukan permasalahan yang terjadi pada warga Desa Kradenan dalam pembuatan KTP-Elektronik.

Berikut menurut penelitian terdahulu jurnal Alfi Syahriyanti yang berjudul “*evaluasi pelaksanaan KTP-Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Cilegon Tahun 2015*” dari hasil penelitian mengenai permasalahan atau kendala pembuatan KTP-Elektronik ditemui beberapa kendala diantaranya adalah sarana dan prasarana yang belum memadai yaitu blanko yang sering kosong, serta jaringan yang sering *error* dan *trouble*. Sering habisnya blanko tentu saja sangat menghambat dalam pelaksanaan KTP-Elektronik ini, keadaan blanko yang kurang stabil saat ini butuh waktu berbulan-bulan untuk pembuatan KTP-Elektronik. masih kurangnya informasi dan pemahaman tentang fungsi KTP-Elektronik sendiri, kendala lainnya yaitu SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih kurang dalam keahlian mengenai KTP-Elektronik, masih banyak yang kurang tahu baik operator maupun bagian pelayanan ditingkat kecamatan.

Berdasarkan perbandingan jurnal dan hasil penelitian peneliti dapat menyimpulkan bahwa permasalahan warga negara terhadap kepemilikan KTP-Elektronik dalam pelaksanaan program ini masih mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya yaitu masih kurang memadainya sarana dan prasarana di kecamatan. Alat perekaman sering mangalami *error dan trouble* atau tidak

berfungsi seperti saat awal-awal baru dilaksanakannya program ini. Kemudian kendala lainnya yaitu ketersediaan blanko KTP-Elektronik yang sering kehabisan bukan hanya seminggu dua minggu tetapi bahkan berbulan-bulan. KTP-Elektronik merupakan kebutuhan dasar masyarakat dalam pengurusan segala hal untuk mendapatkan pelayanan publik, maka dari itu kurang memadainya ketersediaan blanko menyebabkan pelayanan menjadi terhambat sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan publik. Kurangnya informasi pada warga seharusnya warga harus lebih proaktif dan lebih peduli dalam menanggapi permasalahan ini sebab penting bagi warga untuk mengetahui fungsi dari kepemilikan KTP-Elektronik.

## SIMPULAN

Program KTP-Elektronik yang diterapkan masih belum efektif, dikarenakan masih banyak mengalami kendala sehingga belum tercapainya tertib administrasi kependudukan. Program ini masih belum efisien dikarenakan waktu yang cukup lama sebab banyak yang melakukan perekaman KTP-Elektronik, semakin banyak yang melakukan perekaman KTP-Elektronik semakin lama proses penunggalan hasil perekaman KTP-Elektronik. Warga Desa Kradenan kurang proaktif dalam melakukan program perekaman KTP-Elektronik. Masih belum tercapainya kebutuhan warga secara merata karena sering terjadinya ketidakterersediaan blanko yang membuat proses perekaman KTP-Elektronik terhambat. Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa telah mengupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti melakukan sosialisasi tentang program KTP-Elektronik dan pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa telah memberikan surat edaran, menambah jam pelayanan dan melakukan jemput bola kepada warga khususnya warga yang memiliki kebutuhan khusus dan warga yang sudah lanjut usia, menyadari bahwa

pentingnya melakukan perekaman KTP-Elektronik. Petugas pembuatan KTP-Elektronik berharap pemerintah mengeluarkan sarana prasarana yang memadai karena banyak ditemukan alat perekaman yang mulai tidak berfungsi. Program KTP-Elektronik yang telah diterapkan sudah tepat, karena seiring berjalannya waktu jumlah data ganda akan semakin sedikit sehingga database menjadi benar-benar valid namun untuk saat ini masih banyak data yang perlu dirapihkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, Aim. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara yang Demokratis*. Jakarta : Grafindo Media Pratama.
- Arikunto, Suharsimi (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Edisi Revisi V. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono.(2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Dwi, Jatmiko.(2012). *Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat (studi di Kecamatan Grobongan Kabupaten Grobongan)*. Semarang : Universitas 17 Agustus 1945

(<https://www.google.co.id/search?q=jurnal%20kualitas%20pelayanan%20%20ktp%20oleh%20jadmiko&client=ucweb-b&channel=sb>) (diunduh : 05-07-2018, pukul 20:14)

